

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan perancangan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai gambaran akhir dari proses penelitian yang telah berlangsung. Berikut merupakan beberapa kesimpulan atas penelitian ini.

- a. Konflik Papua merupakan konflik yang memakan periode waktu yang lama dan sampai saat ini perkembangan resolusi konflik berjalan cukup pelan. Konflik yang selalu menjadi masalah dalam konflik Papua berhubungan dengan hak asasi manusia, pembangunan, kesejahteraan, sumber daya alam dan perbedaan persepsi sejarah. Konflik berkepanjangan yang terjadi di Papua sampai saat ini belum menemukan titik temu antara pemerintah dengan masyarakat Papua.
- b. Efek dari konflik berkepanjangan Papua akhirnya masuk ke dalam pembahasan Papua dalam ranah internasional. Adanya upaya internasionalisasi konflik Papua dari negara lain yang bermaksud mendukung Papua untuk disintegrasikan dari Indonesia. Namun upaya tersebut merupakan sebuah upaya masuknya kepentingan asing ke dalam Indonesia dengan menggunakan Papua.
- c. Pada dasarnya Konflik Papua merupakan konflik internal yang tidak dapat diganggu oleh masyarakat internasional. Papua merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia dan aktor rasional negara lain tidak dapat melakukan intervensi dikarenakan adanya penghormatan pada prinsip *non-intervention* dari PBB. Namun Upaya tersebut hingga saat ini masih digaungkan dengan

berbagai cara seperti mengangkat kasus Papua ke dalam sidang umum PBB.

- d. Maka dari itu untuk menghentikan upaya internasionalisasi konflik Papua dibutuhkan keterampilan pemerintah dalam membuat kebijakan serta keterampilan pemerintah dalam berdiplomasi.

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah disusun, terdapat beberapa rekomendasi sebagai tindakan lanjut atas hasil penelitian. Beberapa rekomendasi tersebut diantaranya adalah.

- a. Percepatan Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus. Dengan adanya percepatan revisi UU Otonomi Khusus Papua, dapat menjadi sebuah peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan efektifitas percepatan pembangunan di Papua. Selain itu juga UU Otsus akan menjadi sebuah jembatan bagi pemerintah untuk membuka ruang perdamaian dengan cara memberikan kebutuhan masyarakat asli Papua. Patut diperhatikan bahwa realisasi dana Otsus, koordinasi antar kelembagaan menjadi hal penting untuk diperhatikan oleh pemerintah.
- b. Pembukaan Dialog Damai Papua. Dialog merupakan salah satu cara dalam upaya resolusi konflik. Dengan adanya dialog makan penyamaan persepsi dapat dilakukan dan dapat mencari jalan dalam penyelesaian konflik. Berdasarkan penelitian, salah satu penghambat adanya jalur dialog adalah perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat Papua. Pemerintah yang memiliki sebuah konsep pemikiran dialog yang sektoral tidak dapat diterima oleh masyarakat Papua. Di sisi lain masyarakat Papua yang berdialog memiliki orientasi untuk melakukan referendum, yang pada dasarnya adalah topik yang sensitif dalam pemerintah. Maka dari itu dibutuhkan keselarasan dalam pemikiran untuk menyelesaikan konflik dan jalur dialog merupakan cara yang rasional untuk dilakukan.
- c. Memperkuat Hubungan Diplomasi antara Indonesia-Selandia Baru Untuk Membuka Pintu Diplomatik Dengan MSG. Selandia baru merupakan negara yang memiliki posisi krusial dalam di wilayah

pasifik. Posisi krusial tersebut berdasarkan data yang menunjukkan bahwa Selandia Baru menempatkan wilayah pasifik menjadi pasar dalam perdagangan internasional. Hal ini menjadikan negara-negara dalam wilayah pasifik memiliki ketergantungan terhadap Selandia Baru. Dengan mendekatkan Selandia baru menjadi mitra negara, Indonesia dapat meraih posisi yang strategis dalam diplomasi luar negeri dengan negara-negara MSG. Strategi yang diharapkan adalah membuat sebuah keadaan di mana Indonesia dan Selandia Baru memiliki sebuah ikatan saling bergantung sehingga Selandia baru tidak bisa lepas dari Indonesia dan menciptakan kondisi *Chain Ganging*. Dengan situasi ini Indonesia dapat memanfaatkan posisi strategis Selandia Baru untuk mengangkat kekuatan diplomasi Indonesia di wilayah pasifik. Harapan dari kondisi ini adalah terbukanya pasar pasifik secara luas terhadap Indonesia. Langkah yang akan diambil apabila Indonesia sudah menempati posisi tersebut adalah mengisi kekosongan dari pasar Selandia Baru di negara-negara MSG. Dengan begitu negara-negara MSG akan merasakan kekuatan diplomasi Indonesia yang kuat sehingga akan melakukan konsiderasi ulang apabila negara-negara MSG akan melayangkan kritik konflik Papua di ranah internasional.